

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adji, Indriyanto Seno. (2009). *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta.
- Ali, Achmad. (2008). *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- . (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta. hlm. 352.
- Syarin, Alvi. (2009). *Beberapa Masalah Hukum*, Sofmedi, Medan.
- Amirudin, & Asikin, H. Zainal. (2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi. (2006). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. (2016). *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Anonim. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jakarta.
- Attamimi, A Hamid S. (1998). *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Kanisius, Yogyakarta.
- Bagir Manan, 2013, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bryan A. Garner. (2004). *Black's Law Dictionary Eeighth Edition*. USA: West Publishing Co.
- Cooter, Robert & Ulen, Thomas. (2012) *Law and Economics*. 6th edition. Barkeley Law.
- Eko, Prasetya Jaya. (2015). *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Investigation Corruption Transparan Indpennden (ICTI) Dalam Pemberantasan Korupsi pada Instansi Pemerintah Kota Tanjung*.

- Fuady, Munir. (2003). *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidak berdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Juwana, Hikmahanto. (2006). *Penegakan hukum dalam kajian law and Development*, Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Husen, La Ode (2019). *Negara Hukum, Demokrasi, dan Pemisahan Kekuasaan*. Social Politic Genius (SIGn), Makassar.
- IGM Nurdjana. (2010). *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2010, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Cub, Jakarta.
- KPK, 2006. *Memahami untuk membasmi*, KPK, Jakarta.
- L. J. Van Apeldoorn. (2011). *Inleiding tot de Sardis van het Nederlandse Recht*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Penganfar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan I.B.Wyasa Putra, 1999, *Hukum sebagai Suatu sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Loeby loqman, 1997, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lopa, Baharuddin & M. Yamin. (1987). *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Kipas Putih Aksara, Jakarta.
- Lubis, M. Solly, 2000, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, Mandar Maju, Bandung.
- Mas, Marwan. (2012). *Penguatan Argumentasi Fakta-fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim*, Jurnal Yudisial Vol.5(3), Desember 2012.
- Mardjono Reksodiputro, 2004, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

- Marbun, Rocky. (2010). *Persekongkolan Tender Barang/Jasa*. Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Manan, Abdul. (2006). *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- . (2004). *Sistem Peradilan Berwibawa (suatu)*
- Mertokusumo, Sudikno. (2019). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Moch Faisal Salam, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum UI dan Sinar Bakti, Jakarta.
- Moh. Mahfud.MD, 1999, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.
- Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selecta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Musahib, R. (2015). *Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Katalogis, Vol.3(1).
- Musakkir, 2013, *Putusan Hakim yang Diskriminatif dalam Perkara Pidana, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum*. Rangkang Education, Yogyakarta.
- Nawi, Syahrudin, dkk. (2019). *Litigasi dan Non Litigasi Dalam Penyelesaian Konflik Sosial (Menuju Harmonisasi Sosial)*, Kretakupa Print Makassar, Makassar.
- Nusantara, Abdul Hakim. (1999). *Analisa dan Perbandingan Undang-undang Antimonopoli; Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Pena, Tim Prima. (2006). *Kamus Ilmiah Populer*. Gitamedia Press. Surabaya.
- Philipus M. Hadjon. (1999). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta.

- Philipus M, Hadjon, dkk. (2010). *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Pipin, Syarifin & Dedah, Jubaedah. (2006). *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung.
- Naskah Publikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Maritim Raja Haji Tanjung Pinang.
- Purbacaraka, Purnadi & Seokanto, Soerjono. (1993). *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung.
- Puspa, Yan Pramadya. (2001). *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Posner, R. A. (1973). *Economic analysis of law*. Little, Brown and Company.
- Wiyono, R. (2008). *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Kedua . Sinar Grafika. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. (2017). *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan, HR. (2013). *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Ridwan, Syahrani. (2011). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rocky Marbun. (2010). *Persekongkolan Tender Barang/Jasa*. Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Samuelson, Paul & Nordhaus, William. (2020). *Economics* (20th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Siahaan, Maruarar. (2017). *Kekuasaan kehakiman yang Mandiri dan Akuntabel menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jurnal Ketatanegaraan Vol 04/September hal 23
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, Jakarta.
- Surachim & Suhandi Cahaya. (2011). *Strategi Dan Teknik Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutiyono. (2010). *Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana*. Raih Asa Sukses, Cimanggis, Depok.
- . (2014). *Pengantar Sosiologi Hukum*, Fharras Jaya Grafika, Makassar.

- Tambunan, Tulus. (2001). *Perekonomian Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Tuanakotta, Theodorus M. (2009). *Menghitung Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Tim Prima Pena. (2006). *Kamus Ilmia Populer*. Gitamedia Press. Surabaya.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2012. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum; Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Warburton, Christopher E.S. (2021). *Economic Analysis and Law*. Rautledge, London and New York.
- Wiyono, Suko. (2009). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta.
- (2006). *Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia*, Fasa Media, Jakarta.
- Wojowasito. (2010). *Kamus Indonesia - Inggris*, Hasta, Bandung.
- Yuntho, Emerson., Sari, I.D. Arta., Limbong, Jeremiah, Bakar, Ridwan., & Ilyas, F. (2014). *Penerapan Unsur Merugikan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*. Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

B. Disertasi

- Amiruddin, 2021, *Pengaturan Hukum tentang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Eko, Prasetya Jaya. (2015). *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Investigation Corruption Transparan Indpendden (ICTI) Dalam Pemberantasan Korupsi pada Instansi Pemerintah Kota Tanjung*. Naskah Publikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Maritim Raja Haji Tanjung Pinang.
- Hendri Edison, 2023, *Rekonstruksi Regulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Zaenudin, 2018, *Perampasan Harta Benda Milik Terpidana Yang Bukan Diperoleh Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang.

C. Artikel Jurnal

Acheampong, A. O., Boateng, E., & Annor, C. B. (2024). Do corruption, income inequality and redistribution hasten transition towards (non)renewable energy economy? *Structural Change and Economic Dynamics*, 68, 329–354.
<https://doi.org/10.1016/j.strueco.2023.11.006>

Adjei-Bamfo, P., Djajadikerta, H.G., Jie, F., Brown, K. & Kiani Mavi, R. (2022). *Public procurement for innovation through supplier firms' sustainability lens: a systematic review and research agenda*. *Business Strategy and the Environment*, Vol. 32(1), pp. 387-407, doi: 10.1002/bse.3137.

Aghion, P., Bacchetta, P., Ranciere, R., & Rogoff, K. (2009). *Exchange Rate Volatility and Productivity Growth: the Role of Financial Development*. NBER Working Paper 12117.

Ahmad Feri Tanjung, Rizkan Zulyadi, dan Ronald H. S, 2019, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengadaan Alat Kesehatan Di Indonesia*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 1 VOL. 26 JANUARI 2019: 133 -154

Alfada, A. (2019). The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia: A threshold model. *Heliyon*, 5(10).
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02649>

Arifin, Zaenal. (2017). *Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, *Jurnal FH UNPAB*, Vol. 5, No. 5, Oktober 2017. hlm. 59.

Bagir Manan, 2004, *Sistem Peradilan Berwibawa (suatu pencarian)*, *Jurnal MA*, Jakarta.

Budiarjo, 2022. *Perbedaan Kerugian Keuangan Negara dengan Kerugian Perekonomian Negara dalam Perkara Tipikor*.
<https://budiarjolawyer.com>. Diakses tanggal 13 Juni 2024.

Butarbutar, Russel. (2018). *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Di Bidang Konstruksi*. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 9(1), 51-66.

- Blackburn, K., Bose, N., dan Haque, M.E., 2006, *The incidence and persistence of corruption in economic development*. J. Econ. Dyn. Control 30, pp. 2447–2467.
- Clausen, T. H., Demircioglu, M. A., & Alsos, G. A. (2020). Intensity of innovation in public sector organizations: The role of push and pull factors. *Public Administration*, 98(1), 159–176. <https://doi.org/10.1111/padm.12617>
- Dávid-Barrett, E., & Fazekas, M. (2020). Anti-corruption in aid-funded procurement: Is corruption reduced or merely displaced? *World Development*, 132. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105000>
- Emerson Yuntho, *et al.*, 2014. *Penerapan Unsur Merugikan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*. Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Grandia, J. and Meehan, J. (2017). Public procurement as a policy tool: using procurement to reach desired outcomes in society. *International Journal of Public Sector Management*, Vol. 30 No. 4, pp. 302-309, doi: 10.1108/IJPSM-03-2017-0066.
- Gyimah-Brempong, K. (2002). *Corruption, economic growth, and income inequality in Africa (Vol. 3)*. Springer-Verlag.
- Grandia, J. and Meehan, J. (2017). Public procurement as a policy tool: using procurement to reach desired outcomes in society. *International Journal of Public Sector Management*, Vol. 30 No. 4, pp. 302-309, doi: 10.1108/IJPSM-03-2017-0066.
- Graycar, Adam and Prenzler, Tim. (2013). *Understanding and Preventing Corruption*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Hamdi, H., & Hakimi, A. (2023). Corruption, imported innovation, and growth: Evidence using the panel smooth transition regression approach for developing countries. *Regional Science Policy and Practice*, 15(5), 956–972. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12611>
- Hamzah Halim dan H.S. Muh. Ikhsan Saleh, 2009, *Persekongkolan Rezim Politik Lokal*, Pukap-Indonesia, Makassar.
- Jamillah. (2015). *Pertanggungjawaban Hukum dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia*." *Jurnal Mercatoria* 8, no. 2 (2015): 163-175.
- Karyasa, I N. R., Salain, I M. Alit K., & Nadiasa, Mayun. (2014). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gagal Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (e-Procurement) di*

Kabupaten Badung. Jurnal Spektran. Pascasarjana Universitas Udayana. hlm. 26.

- Kalyuzhnova, Y., Azhgaliyeva, D., & Belitski, M. (2022). Public Policy Instruments for Procurement: An Empirical Analysis. *Technological Forecasting and Social Change*, 176. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121472>
- Kelman, H. C. (1958). Compliance, identification, and internalization: Three processes of attitude change. *Journal of Conflict Resolution*, 2(1), 51-60.
- Keneck-Massil, J., Nomo-Beyala, C., & Owoundi, F. (2021). The corruption and income inequality puzzle: Does political power distribution matter? *Economic Modelling*, 103. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2021.105610>
- Khorana, S., Caram, S., & Rana, N. P. (2024). Measuring public procurement transparency with an index: Exploring the role of e-GP systems and institutions. *Government Information Quarterly*, 41(3). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.101952>
- Loijas, K., Jääskeläinen, A., & Karttunen, E. (2024). Dyadic capabilities in implementing performance-based public procurement. *Journal of Business and Industrial Marketing*, 39(13), 128–144. <https://doi.org/10.1108/JBIM-09-2023-0542>
- I N. R. Karyasa., I M. Alit K. Salain., dan Mayun Nadiasa, 2014, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gagal Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (e-Procurement) di Kabupaten Badung*. Jurnal Spektran. Pascasarjana Universitas Udayana.
- Mas, Marwan. (2012). *Penguatan Argumentasi Fakta-fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim*, Jurnal Yudisial Vol.5 No.3 Desember 2012 hal 294
- Malacina, I., Karttunen, E., Jääskeläinen, A., Lintukangas, K., Heikkilä, J. and Kähkönen, A.-K. (2022). Capturing the value creation in public procurement: a practice-based view. *Journal of Purchasing and Supply Management*, Vol. 28 No. 2, p. 100745, doi: 10.1016/j.pursup.2021.100745.
- Malanski, L. K., & Póvoa, A. C. S. (2021). Economic growth and corruption in emerging markets: Does economic freedom matter? *International Economics*, 166, 58–70. <https://doi.org/10.1016/j.inteco.2021.02.001>

- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidak berdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Musahib, R. 2015. *Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Katalogis, Vol.3(No.1).
- Obwegeser, N. and Müller, S.D. (2018). Innovation and public procurement: terminology, concepts, and applications. *Technovation*, Vol.74/75, pp. 1-17, doi: 10.1016/j.technovation.2018.02.015.
- Owusu, E. K., Chan, A. P. C., & Wang, T. (2021). Tackling corruption in urban infrastructure procurement: Dynamic evaluation of the critical constructs and the anti-corruption measures. *Cities*, 119. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103379>
- Parsons, Brandon. (2025). Unpacking corruption: The role of economic freedom in developing countries. *Research in Economics*, 79, 1-17.
- Permana, T. C. I., 2018. *Wewenang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Menghitung Kerugian Keuangan Negara*. *Jurnal Hukum Paratun*, 1(1), 101–118
- Posner, Richard. A. (1973). *Economic Analysis of Law*. Little, Brown and Company.
- Ramoni-Perazzi, J., & Romero, H. (2022). Exchange rate volatility, corruption, and economic growth. *Heliyon*, 8(12). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e12328>
- Rizki Agung Firmansyah, 2020, *Jurnal: Konsep Kerugian Perekonomian Negara Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. *Jurisdiction*. 2020; 669-686. <https://e-journal.unair.ac.id/JD>
- Rehman, A., Mehmood, W., Ali Alsmady, A., & Sharif, A. (2024). Corruption's impact on non-performing loans of banks in emerging markets: Empirical insights. *Research in Globalization*, 9. <https://doi.org/10.1016/j.resglo.2024.100241>
- Saha, S., Beladi, H., & Kar, S. (2021). Corruption control, shadow economy and income inequality: Evidence from Asia. *Economic Systems*, 45(2). <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2020.100774>
- Saha, S., & Sen, K. (2023). Do economic and political crises lead to corruption? The role of institutions. *Economic Modelling*, 124. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106307>

- Saidi dalam Sandi Herintus Kabba, I Made Arjaya, Made Minggu Widyantara, 2022. *Prosedur Pengembalian dan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol. 3, No. 1, 2022 : <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4237.68-74>
- Satoto, S., & Fitria, F., 2022. *Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Melakukan Audit Investigasi Guna Menentukan Kerugian Keuangan Negara*. Wajah Hukum, 6(1),174. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.292>
- Siahaan, Maruarar. (2017). *Kekuasaan kehakiman yang Mandiri dan Akuntabel menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jurnal Ketatanegaraan Vol 04/September, hal 23.
- Supriyanto, et.al. 2017, *Redefinisi Unsur “yang Dapat Merugikan Keuangan (Perekonomian) Negara*, Amanna Gappa, Vol. 25 No. 2 September 2017 P-ISSN: 0853-1609, E-ISSN: 2549-9785
- Tanzi, V. (1998). *Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope, and Cures*. *International Monetary Fund Working Paper* 98/63, Washington
- Teguh Prasetyo, “*Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*”, dalam Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi Oktober 2010.
- Walker, H., Di Sisto, L., & McBain, D. (2008). Drivers and barriers to environmental supply chain management practices: Lessons from the public and private sectors. *Journal of Purchasing and Supply Management*, 14(1), 69–85. <https://doi.org/10.1016/j.pursup.2008.01.007>
- Waxenecker, H., & Prell, C. (2024). Corruption dynamics in public procurement: A longitudinal network analysis of local construction contracts in Guatemala. *Social Networks*, 79, 154–167. <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2024.07.001>

D. Internet

- DetikSulSel. *Kejati Sulawesi Selatan Tangani 128 Kasus Korupsi dengan Kerugian Rp 91 M selama 2024*. 01 Januari 2025.
- Diky Anandya dan Lalola Easter, 2023. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 “Korupsi Lintas Trias*

Politika” Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202022>. Diakses Tanggal 2 Desember 2023.

Heriani, F. N., 2021. *Siapa Berhak Menetapkan Kerugian Negara di Kasus Tipikor? Ini Penjelasan Hukumnya [Media Online]*. Retrieved November 23, 2022, from Hukum Online website: <https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-berhak-menetapkan-kerugian-negara-di-kasus-tipikor-ini-penjelasan-hukumnya-lt61bb7b4ad897c>

Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an*, PT. Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta.

LKPP. *Sinergi LKPP dan APH Sulawesi Selatan Kunci Penanganan Kasus Pengadaan Barang/Jasa di Wilayah Sulawesi Selatan*. 12 September 2024.

Marwan Effendy, 2010, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Makalah : Disampaikan Dalam Seminar “Usaha Menghindari Jerat Pidana Dalam Delik Korupsi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010”, Diselenggarakan oleh Majalah Hukum Prosekutor di Hotel Patra, Semarang, tanggal 19 April 2011

Radarselatan Fajar.co.id. *ACC Sulawesi Ungkap Kejahatan Korupsi Sepanjang 2022: Pelaku Didominasi ASN*. Sabtu, 7 Januari 2023. <https://radarselatan.fajar.co.id/2023/01/07/acc-sulawesi-ungkap-kejahatan-korupsi-sepanjang-2022-pelaku-didominasi-asn/>. Diakses Tanggal 2 Desember 2023.

Rudy M. Harahap, 2023. *Melek Kerugian Perekonomian Negara Bersama BPKP Kalsel*. Seminar Nasional Hari Bhakti Adhyaksa Ke-63 di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Acheampong, A. O., Boateng, E., & Annor, C. B. (2024). Do corruption,

income inequality and redistribution hasten transition towards

(non)renewable energy economy? *Structural Change and Economic*

Dynamics, 68, 329–354. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2023.11.006>

- Alfada, A. (2019). The destructive effect of corruption on economic growth in Indonesia: A threshold model. *Heliyon*, 5(10).
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02649>
- Clausen, T. H., Demircioglu, M. A., & Alsos, G. A. (2020). Intensity of innovation in public sector organizations: The role of push and pull factors. *Public Administration*, 98(1), 159–176.
<https://doi.org/10.1111/padm.12617>
- Dávid-Barrett, E., & Fazekas, M. (2020). Anti-corruption in aid-funded procurement: Is corruption reduced or merely displaced? *World Development*, 132. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105000>
- Gyimah-Brempong, K. (2002). *Corruption, economic growth, and income inequality in Africa* (Vol. 3). Springer-Verlag.
- Hamdi, H., & Hakimi, A. (2023). Corruption, imported innovation, and growth: Evidence using the panel smooth transition regression approach for developing countries. *Regional Science Policy and Practice*, 15(5), 956–972. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12611>
- Kalyuzhnova, Y., Azhgaliyeva, D., & Belitski, M. (2022). Public Policy Instruments for Procurement: An Empirical Analysis. *Technological Forecasting and Social Change*, 176.
<https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121472>
- Keneck-Massil, J., Nomo-Beyala, C., & Owoundi, F. (2021). The corruption and income inequality puzzle: Does political power distribution

matter? *Economic Modelling*, 103.

<https://doi.org/10.1016/j.econmod.2021.105610>

Khorana, S., Caram, S., & Rana, N. P. (2024). Measuring public procurement transparency with an index: Exploring the role of e-GP systems and institutions. *Government Information Quarterly*, 41(3).
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.101952>

Loijas, K., Jääskeläinen, A., & Karttunen, E. (2024). Dyadic capabilities in implementing performance-based public procurement. *Journal of Business and Industrial Marketing*, 39(13), 128–144.
<https://doi.org/10.1108/JBIM-09-2023-0542>

Malanski, L. K., & Póvoa, A. C. S. (2021). Economic growth and corruption in emerging markets: Does economic freedom matter? *International Economics*, 166, 58–70. <https://doi.org/10.1016/j.inteco.2021.02.001>

Owusu, E. K., Chan, A. P. C., & Wang, T. (2021). Tackling corruption in urban infrastructure procurement: Dynamic evaluation of the critical constructs and the anti-corruption measures. *Cities*, 119.
<https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103379>

Ramoni-Perazzi, J., & Romero, H. (2022). Exchange rate volatility, corruption, and economic growth. *Heliyon*, 8(12).
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e12328>

Rehman, A., Mehmood, W., Ali Alsmady, A., & Sharif, A. (2024). Corruption's impact on non-performing loans of banks in emerging

markets: Empirical insights. *Research in Globalization*, 9.

<https://doi.org/10.1016/j.resglo.2024.100241>

Saha, S., Beladi, H., & Kar, S. (2021). Corruption control, shadow economy and income inequality: Evidence from Asia. *Economic Systems*, 45(2). <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2020.100774>

Saha, S., & Sen, K. (2023). Do economic and political crises lead to corruption? The role of institutions. *Economic Modelling*, 124. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106307>

Spyromitros, E., & Panagiotidis, M. (2022). The impact of corruption on economic growth in developing countries and a comparative analysis of corruption measurement indicators. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2129368>

Walker, H., Di Sisto, L., & McBain, D. (2008). Drivers and barriers to environmental supply chain management practices: Lessons from the public and private sectors. *Journal of Purchasing and Supply Management*, 14(1), 69–85. <https://doi.org/10.1016/j.pursup.2008.01.007>

Waxenecker, H., & Prell, C. (2024). Corruption dynamics in public procurement: A longitudinal network analysis of local construction contracts in Guatemala. *Social Networks*, 79, 154–167. <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2024.07.001>

Berdasarkan Perpres No.54 Tahun 2010, Diselenggarakan oleh Majalah

Hukum Prosekutor di Hotel Patra, Semarang, tanggal 19 April 2011, hlm. 25-

26